

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Konsep Desentralisasi dan Dekonsentrasi	11
B. Pelimpahan Wewenang dan Kualitas Aparat Pelaksana	15
C. Tata Cara Pelimpahan Wewenang	17
D. Kedudukan, Wewenang dan Hubungan Bupati dengan Camat	19
E. Konsep Pelayanan Publik	21
F. Pelimpahan Wewenang dalam rangka Pelayanan Prima	25
G. Kerangka Pemikiran	29
H. Definisi Konseptual	33
I. Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Unit Analisis dan Objek Penelitian	37
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Analisa Data	39
BAB IV DISKRIPSI ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN IZIN TEMPAT USAHA	42
A. Dasar, Kedudukan dan Fungsi Sekretariat Daerah	42
B. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	43
C. Tugas dan Fungsi	44
D. Mekanisme Kerja	49
E. Diskripsi Bagian Perekonomian	50
F. Diskripsi Izin Tempat Usaha	53



<b>BAB V</b>	<b>ANALISA DAN INTEPRETASI DATA</b>	<b>58</b>
	A. Proses Pelimpahan Wewenang	59
	B. Kecepatan Pelayanan Izin Tempat Usaha	70
	1. Waktu yang dibutuhkan	74
	2. Jumlah <i>Stake holders</i> yang terlibat	77
	3. Jumlah Izin yang mampu dibuat	80
	C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecepatan Pelayanan SITU	84
	1. Perubahan Struktur Organisasi	84
	2. Ketersediaan Informasi	88
	3. Kondisi Geografis Wilayah	93
	4. Ketersediaan Sarana Transportasi	97
	5. Keterkaitan Antar Variabel	101
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>107</b>
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran-Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	
	PEDOMAN WAWANCARA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1	Daftar Kecamatan dan Jaraknya dari Kota Kabupaten	6
Tabel 4.1	Daftar PNS Bagian Perekonomian berdasarkan Golongan Ruang Pangkat	51
Tabel 4.2	Daftar PNS Bagian Perekonomian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	52
Tabel 4.3	Daftar PNS Bagian Perekonomian berdasarkan DIKLAT Struktural yang diikuti	52
Tabel 5.1	Realisasi Pembuatan SITU Baru dan Perpanjang selama Tahun 2002 dan 2003	70
Tabel 5.2	Perbandingan Waktu Pelayanan SITU sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang	76
Tabel 5.3	Perbandingan Jumlah Stake holders dalam pembuatan SITU sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang	79
Tabel 5.4	Jumlah SITU Baru dan Perpanjangan yang dibuat selama 1998-2003	80
Tabel 5.5	Jumlah Rata-rata SITU dalam sebulan yang dibuat selama tahun 2002-2003	82
Tabel 5.6	Perbandingan Jumlah Rata-rata SITU dalam sebulan sebelum dan sesudah pelimpahan wewenang	83
Tabel 5.7	Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan per Kecamatan dalam Kabupaten Lahat	94
Tabel 5.8	Jarak dan Waktu Tempuh dari setiap Kecamatan ke Kota Kabupaten Lahat	98
Tabel 5.9	Panjang Jalan Menurut Tingkat Pengerasan per Kecamatan dalam Kabupaten Lahat	99
Tabel 5.10	Matriks Hubungan Antar Variabel	105